

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan tahunan merupakan sumber informasi penting bagi para pemangku kepentingan (Wahyuni, 2021). Dalam mengomunikasikan informasi kinerja perusahaan kepada para investor perusahaan harus menghasilkan laporan yang komprehensif (laporan lingkungan, sosial, tanggung jawab sosial perusahaan atau keberlanjutan) atau menambahkan informasi ke laporan keuangan tahunan (Ahmed, 2023). Namun, laporan-laporan tersebut telah terpisah dari laporan keuangan sehingga menyulitkan bagi investor untuk memahami perusahaan dalam penciptaan nilai, sehingga ada kebutuhan atau dorongan bagi perusahaan untuk menggabungkan laporan-laporan tersebut dalam satu laporan (Briem & Wald, 2018).

Pada tahun 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperkenalkan tujuan baru yang disebut "*Sustainable Development Goals*" (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sub-tujuan terkait, yang akan dicapai dari tahun 2016 hingga 2030 (Iskandar et al., 2023). Indonesia berada di urutan ke-82 dari 163 negara dengan skor 69,16 (Sustainable Development Report, 2021). Peringkat ini jauh di bawah target 100 poin dan sebagian besar negara di Asia Tenggara berada di atas peringkat Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang cukup

baik, namun dalam hal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia masih berada pada level yang rendah (Oktaviani, 2022).

Van der Waal dan Thijssens (2020) menjelaskan bahwa agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk mengadopsi praktik berkelanjutan. Faktanya, Bebbington dan Unerman (2018, 2020) menjelaskan bahwa tujuan ini memberikan peluang bagi organisasi atau pebisnis untuk mengatasi kekurangan pelaporan keberlanjutan. Sehingga organisasi didorong untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs (GRI, 2022). Salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mewujudkannya adalah dengan melaksanakan praktik *integrated reporting* yang mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan mereka (Kurnianto et al., 2020).

Integrated reporting merupakan suatu laporan tunggal yang menggabungkan bagian-bagian penting dari informasi yang saat ini dilaporkan secara terpisah (keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola) secara komprehensif dan mampu menunjukkan hubungan antara semua bagian-bagian tersebut yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang (IIRC, 2013). *Integrated reporting* berperan penting sebagai sarana komunikasi dan pengungkapan perusahaan dengan tujuan menyajikan hubungan antara keuangan dan kegiatan non-keuangan dalam menciptakan nilai perusahaan. *Integrated reporting* diinisiasi oleh

International Integrated Reporting Council (IIRC) yang didukung oleh *Global Reporting Initiative (GRI)* pada tahun 2010 (Kılıç & Kuzey, 2018).

Pada tahun 2013, IIRC menerbitkan *integrated reporting framework* yang merupakan jenis pelaporan kinerja perusahaan yang transparan dan dalam format pelaporan terbaru. Tujuan dari adanya *framework* ini untuk mendefinisikan prinsip dan faktor-faktor yang mengatur keseluruhan isi dari *integrated reporting* (Garcia-Sanchez et al., 2020). Dengan menekankan *integrated reporting* diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis. Di Indonesia belum ada peraturan yang mewajibkan penerapan *integrated reporting* dalam pelaporan perusahaan, sehingga *integrated reporting* termasuk dalam pengungkapan sukarela (Prawesti, 2019). Konsep dasar *integrated reporting* adalah untuk menyediakan laporan yang terintegrasi penuh dari informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan seperti lingkungan, tata kelola, dan sosial (Febriansyah, 2022).

Penerapan *integrated reporting* di Indonesia yang masih bersifat *voluntary* dan belum diatur secara tegas oleh badan penyusun standar akuntansi (Lifa Karini & Cahyono, 2023). Peneliti mengemukakan bahwa *integrated reporting* relevan untuk dilakukan terlebih dipraktikkan di Indonesia yang masih berbasis *voluntary*. Sejalan dengan isu-isu terkait penerapan *integrated reporting* negara indonesia masih minim dalam pengungkapannya jika dibandingkan dengan negara lain (Kurnianto et al., 2020). Selain itu, masih sedikit penelitian tentang *integrated reporting* di

negara berkembang termasuk di Indonesia. Minimnya *integrated reporting* sebagai alat pembanding antar perusahaan menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya perusahaan di Indonesia yang menerapkan strategi keberlanjutan (Azzahra, 2022). Oleh karena itu, *integrated reporting* perlu diterapkan untuk mengatasi kekurangan dalam model pelaporan keuangan sehingga dapat memberikan pandangan komprehensif kepada investor dan pemangku kepentingan tentang kinerja perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan mencapai nilainya dalam jangka pendek, jangka menengah dan panjang (Briem & Wald, 2018). Perkembangan model pelaporan telah menarik perhatian para praktisi, regulator, dan investor (Kurniawan et al., 2020). *Integrated reporting* menjadi praktik perkembangan pelaporan terbaru yang diterapkan oleh perusahaan (Wang et al., 2020). Pelaporan perusahaan akan cenderung lebih memiliki informasi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan investor dan pemangku kepentingan.

Integrated Reporting bertujuan untuk mengintegrasikan kinerja keuangan dengan informasi sosial dan lingkungan yang dibutuhkan untuk memahami perkembangan, kinerja, serta dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat (Guthrie et al., 2017). *Integrated reporting* berperan penting dalam meningkatkan pengungkapan SDGs karena pengungkapannya menyelidiki budaya dan strategi serta sebagai alat untuk mengubah SDGs menjadi aktivitas yang terukur (Ahmed, 2023). Laporan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian SDGs sehubungan dengan

sistem pengungkapan perusahaan bertindak sebagai alat perencanaan yang memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi sistem dan cara untuk menghubungkan dan meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, sehingga memiliki visi global dan proses penciptaan nilai (Di Vaio et al., 2020).

Konsep ini diusulkan sebagai langkah solutif untuk mendorong keterlibatan lebih aktif dari perusahaan dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) pada tahun 2030, karena *Integrated reporting* menjadi tujuan perusahaan menyediakan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kinerja perusahaan (Higgins et al., 2019; Hichri, 2021). Adanya peran tata kelola perusahaan dapat mengembangkan dan memperkuat dalam praktik *integrated reporting*.

Dalam fenomena tersebut telah tergambarkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berbuat jujur dan adil atas segala perbuatannya kepada orang lain terutama saat bermu'amalah dan dapat mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu yang telah terjadi serta memperkerjakan sesuatu yang menjadi haknya. Sebagaimana dalam hal ini penting bagi manajerial dapat memenuhi hak dan tanggungjawabnya baik untuk investor maupun pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat mengungkapkan kinerjanya secara transparan dengan jujur tanpa pengurangan maupun adanya kejadian yang di manipulasi. Allah telah berfirman pada Quran Surah Asy-Syu'ra Ayat 181-183, sebagai berikut :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٢٨١﴾
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨١﴾

Artinya :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; (181). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182). dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183)” (Asy-Syu'ara:181- 183).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersifat sukarela (*integrated reporting*) dapat dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap manajer dalam mengelola perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi atas kinerjanya secara baik dan transparan. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan.

Direktur utama atau *Chief Executive Officer (CEO)* adalah seseorang yang memegang kendali atau memiliki jabatan tertinggi yang bertanggung jawab atas semua rencana dan keputusan strategis perusahaan (Josephine & Hasnawati, 2022). Masa jabatan CEO (*CEO Tenure*) adalah

lamanya kedudukan seorang CEO dalam menjabat di suatu perusahaan. Hal ini menjadi karakteristik penting karena berpengaruh pada pengungkapan kinerja perusahaan dengan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan demi dukungan pemangku kepentingan (Ummah et al., 2021). Huang (2013) menjelaskan bahwa CEO sebagai organ tata kelola yang memiliki pengaruh terkuat karena CEO memegang peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam strategi dalam kinerja berkelanjutan perusahaan khususnya pada *environmental social government*. Hambrick & Fukutomi (1991) menjelaskan upaya dalam peningkatan kualitas *disclosure* dapat dipengaruhi oleh adanya masa jabatan CEO dalam suatu jajaran dewan. Berdasarkan Peraturan OJK No 33/ Pojk.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ditetapkan masa jabatan CEO dan direksi lainnya maksimal lima tahun.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa adanya pandangan yang beragam mengenai keragaman masa jabatan CEO. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara masa jabatan CEO yang lama terhadap pengungkapan *Integrated Reporting* (Khan et al., 2019; Oware & Awunyo-Vitor, 2021; Qaderi et al., 2023a; Ratri et al., 2021; Triyani & Setyahuni, 2020) berbeda dengan hasil penelitian (Cho et al., 2019; Katmon et al., 2019; Rao & Tilt, 2016; Tiron-Tudor et al., 2020) yang menyatakan adanya hubungan positif dari pengaruh lamanya masa jabatan CEO terhadap *Integrated Reporting*. Masa kerja yang lama cenderung lebih memiliki keuntungan, karena CEO memiliki lebih banyak pengalaman

dengan kebijakan perusahaan dan keahlian dalam mengawasi proses pelaporan organisasi (Cahyono et al., 2023; Cho et al., 2019). CEO dengan masa jabatan lama, akan banyak memahami tentang kegiatan dan peraturan yang terkait dengan perusahaan (Katmon et al., 2019). Lamanya masa jabatan CEO mampu membangun keahlian unik khusus perusahaan dan hubungannya dengan investor dapat dianggap baik sebagai perusahaan yang lebih bereputasi dan berpengtahuan luas dalam pengungkapannya (Liu et al., 2010).

Di sisi lain, CEO yang masa jabatannya lama akan cenderung menghindari risiko dan merasa nyaman dengan posisinya serta lebih mementingkan tujuan pribadinya, sehingga enggan untuk melakukan perubahan untuk mencapai tujuan keberlanjutan perusahaan (Ratri et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa lamanya masa jabatan CEO tidak benar-benar memfokuskan kinerja mereka pada praktik *integrated reporting*, melainkan mereka hanya ingin reputasi mereka terjaga. CEO yang merasa masa jabatannya akan segera berakhir bukan berarti semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja pada praktik pengungkapan laporan nonkeuangan, melainkan berusaha meningkatkan citra positif pemangku kepentingan (Cahyono et al., 2023; Triyani & Setyahuni, 2020). CEO yang memiliki masa kerja yang lama cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripadanya (Muttakin et al., 2018; Qaderi et al., 2023b). Oleh karena itu dari keberagaman argumen dan hasil penelitian sebelumnya, Masa jabatan yang lama dapat memberikan CEO kesempatan

untuk membangun pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait perusahaan. CEO yang berpengalaman dalam operasi perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana karena CEO memiliki kesempatan lebih lama untuk mengimplementasikan tujuan dan strateginya pada jangka panjang. Semakin lama masa jabatan CEO akan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang luas sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik perusahaan akan semakin memberikan transparansi pada pemangku kepentingan terutama investor sehingga berinisiatif untuk memberikan laporan yang lebih komprehensif.

Audit Committee dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam memantau efektivitas manajemen, pemegang saham bergantung pada kompetensi *Audit Committee* (Gautama et al., 2017). *Audit Committee* sebagai sub-komisi yang terdiri dari anggota dengan memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam mengelola dan melaporkan pengungkapan keuangan dan non-keuangan perusahaan (Gerwing et al., 2022). Hal ini dianggap menjadi sumber modal bagi perusahaan karena latar belakang nonkeuangan yang diungkapkan memungkinkan bagi perusahaan untuk memasukkan isu-isu keberlanjutan ke dalam operasi strategisnya dan menerapkannya dalam perusahaan (Liao et al., 2015). *Audit committee* dianggap sebagai mekanisme penting dalam keseluruhan komposisi tata kelola perusahaan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan (Raweh et al., 2021).

Namun terdapat peneliti yang menjelaskan bahwa *Audite Commite Expertise* perlu didorong untuk memiliki keahlian dibidang keuangan, hukum, teknologi, industri dan tata kelola (baatwah et al 2013). *Audit Committee* yang memiliki anggota dengan keahlian dan pemahaman yang mendalam tentang *integrated reporting* dapat memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan dan kualitas pelaporan tersebut.

Menurut Rouf (2011) menunjukkan bahwa *audit committee* dan struktur kepemimpinan dewan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari *Audite Commite Expertise* akan mendorong perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investor dan pemangku kepentingan dengan mengawasi laporan keuangan (Pizzi et al., 2021). Beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan antara masa jabatan CEO terhadap pengungkapan perusahaan dengan hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga menyebabkan ketidakonsistenan hasil dari pengaruh masa jabatan CEO terhadap *integrated reporting* (Dani & Purwanti, 2021) . Perbedaan hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan secara komprehensif yang diukur dengan *integrated reporting*. Adanya *Audit committe* dalam hal ini dapat membantu meminimalkan risiko tindak kemanajerialan dan kesadaran bagi CEO untuk lebih memperhatikan tujuan jangka panjang dalam bentuk pengungkapan *integrated reporting*. Lamanya masa jabatan CEO akan cenderung memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang

luas sehingga dapat memberikan kinerja yang baik dengan adanya pengawasan dari *audit committee* yang *experts* maka perusahaan akan lebih cenderung berhati-hati melakukan praktek pengungkapan yang komprehensif. *Audite Committee Expertise* dapat memberikan bimbingan dan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaporan terintegrasi dilakukan dengan baik.

Pelaporan berbasis *mandatory* dan *voluntary* dari *integrated reporting* menjadi topik yang menarik karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan dari penerapan keduanya (Kurniawan et al., 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *corporate governance* perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan *integrated reporting* karena adanya ketidakonsistenan hubungan masa jabatan CEO dalam mempengaruhi *integrated reporting*. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan dengan *Audite Committe Expertise* sebagai variable moderasi dan sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya secara langsung terhadap *integrated reporting*. Masa jabatan CEO yang lama cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan kerja yang luas dengan adanya *audit committee expertise* maka tingkat kinerja CEO akan semakin baik karena akan cenderung untuk lebih memberikan informasi kinerjanya secara transparan sehingga perusahaan akan cenderung berinisiatif melakukan pengungkapan yang lebih luas dan komprehensif melalui *Integrated Reporting*. Hal ini didukung karena dengan adanya keahlian yang kompeten dari *audit committee* dapat memberikan dorongan dan pengawasan yang

lebih efektif terhadap CEO. Penelitian *integrated reporting* sebelumnya banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa (Ahmed, 2023; Suttipun, 2017) dan negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan dan Malaysia.

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* dan *Upper Echelon Theory*, *Agency theory* menjelaskan hubungan antara pihak agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan kepemilikan masing-masing sehingga untuk mengurangi tindak asimetri informasi pihak agen harus memberikan pengungkapan secara komprehensif. Oleh karena itu teori ini menjadi dasar bahwa pengungkapan *integrated reporting* secara akuntabilitas dan transparansi dapat untuk mengurangi adanya asimetri informasi perusahaan. Sedangkan *Upper Echelon Theory* yang digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan bahwa karakteristik atau latar belakang manajemen merupakan salah satu penentu pilihan startegis yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan (Karake, 1995). Teori ini berfokus pada pengaruh karakteristik, nilai, dan pengalaman para pemimpin terhadap pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Berdasarkan dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa *Upper Echelon Theory* merekomendasikan penggunaan karakteristik yang dapat diamati untuk mengantisipasi keputusan strategis manajer puncak, penelitian sebelumnya memilih usia, masa kerja, pendidikan, nilai saham, nilai opsi saham, dan dualitas CEO, sebagai penentu tingkat pengungkapan perusahaan (Altunbaş et al., 2020; Hambrick & Mason, 1984). *Upper Echelons Theory* menyatakan bahwa

latar belakang eksekutif perusahaan berada di puncak pilihan strategis organisasi yang menentukan tingkat dan arah tindakan pengungkapan pelaporan keuangan dan non-keuangan perusahaan.

Peneliti memberikan kontribusi topik khususnya di negara Indonesia pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Struktur tata kelola yang kuat dan efisien dengan dewan direksi yang efektif mendorong pemikiran terintegrasi dalam meningkatkan praktik *integrated reporting*. Semakin banyak praktik *integrated reporting*, semakin mudah mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Di sisi lain, peneliti percaya bahwa untuk memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi bisnis, harus ada sistem tata kelola yang efektif untuk mengendalikan pelaksanaan proses tersebut. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Masa Jabatan CEO terhadap Integrated Reporting dengan Audite Committee Exspertise sebagai variabel pemoderasi”***

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan batasan masalah pada masalah yang akan diteliti:

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor privat yaitu semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022.

2. Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan *Integrated Reporting*, akan tetapi pada penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan *karakteristik tata kelola (Masa Jabatan CEO dan Audite Committee Expertise)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Masa Jabatan CEO berpengaruh positif terhadap *Integrated Reporting* ?
2. Apakah *Audite Committee Expertise* berpengaruh positif terhadap *Integrated Reporting* ?
3. Apakah Masa Jabatan CEO berpengaruh positif terhadap *Integrated Reporting* yang di moderasi oleh *Audit Committee Expertise*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pada:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif Masa Jabatan *CEO* terhadap *Integrated Reporting*.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif *Audit Committee Expertise* terhadap *Integrated Reporting*.

3. Untuk menganalisis berpengaruh positif Masa Jabatan CEO terhadap *Integrated Reporting* yang di moderasi oleh *Audit Committee Expertise*.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini bermanfaat dalam bidang akuntansi keuangan untuk memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Selain itu, manfaat penelitian ini secara khusus, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memeberikan bukti empiris mengenai pengaruh masa jabatan CEO terhadap *integrated reporting* dengan *audite committee expertise* sebagai variabel pemoderasi. Bukti empiris ini diharapkan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan atau referensi kepada peneliti selanjutnya. Selain itu, mengacu pada perbedaan dengan peneliti sebelumnya, salah satunya adalah perbedaan sampel dan variabel yang digunakan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perusahaan di Indonesia menerapkan *integrated reporting* yang dipengaruhi dari tata kelola perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan antusias pada perusahaan dalam menerapkan praktik *integrated reporting* dengan adanya mekanisme dari tata kelola perusahaan untuk memberikan value perusahaan

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dari adanya penelitian terkait pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *integrated reporting* dengan *audite committee expertise* sebagai variabel pemoderasi.